



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 12 /KPTS/M/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 568/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan;
- b. bahwa dengan adanya inflasi, perubahan derajat kontribusi pengguna air permukaan, dan perubahan kondisi daerah termasuk potensi penurunan pendapatan asli daerah dari pajak air permukaan, perlu dilakukan evaluasi kembali harga dasar air permukaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN.

KESATU : Menetapkan Harga Dasar Air Permukaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : A. Harga Dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU digunakan sebagai salah satu faktor untuk menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan oleh pemerintah provinsi.
- B. Penghitungan Nilai Faktor Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.
- KETIGA : Dalam hal volume air yang diambil dibawah 60 (enam puluh) liter per detik, bobot koefisien yang digunakan 30% (tiga puluh persen).
- KEEMPAT : Dalam hal air yang digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, ketentuan yang digunakan adalah:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas diatas 10 Megawatt menggunakan koefisien 100% (seratus persen);
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas 250 Killowatt sampai dengan 10 Megawatt menggunakan koefisien 95% (sembilan puluh lima persen);
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas kurang dari 250 Killowatt menggunakan koefisien 90% (sembilan puluh persen);
- KELIMA : Dalam hal terjadi inflasi, perubahan derajat kontribusi pengguna air permukaan, dan perubahan kondisi perekonomian daerah, harga dasar air permukaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dapat diubah.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 568/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
4. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Januari 2019  
MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



*M. Basuki Hadimuljono*  
M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 MENTERI PEKERJAAN UMUM  
 DAN PERUMAHAN RAKYAT  
 NOMOR 12/KPTS/M/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN HARGA DASAR  
 AIR PERMUKAAN

TABEL HARGA DASAR AIR PERMUKAAN

| No | Provinsi           | Air Minum<br>(Rp/m <sup>3</sup> )             | Industri<br>(Rp/m <sup>3</sup> )          |                                              |                                             | Listrik<br>(Rp/KwH)             |
|----|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                    | Air Minum<br>(Rp/m <sup>3</sup> )<br>Maksimal | Niaga<br>(Rp/m <sup>3</sup> )<br>Maksimal | Industri<br>(Rp/m <sup>3</sup> )<br>Maksimal | Tambang<br>(Rp/m <sup>3</sup> )<br>Maksimal | Listrik<br>(Rp/KwH)<br>Maksimal |
| 1  | Aceh               | 302                                           | 865                                       | 525                                          | 518                                         | 200                             |
| 2  | Sumatera Utara     | 302                                           | 865                                       | 525                                          | 518                                         | 300                             |
| 3  | Riau               | 302                                           | 865                                       | 1717                                         | 518                                         | 200                             |
| 4  | Sumatera Barat     | 302                                           | 865                                       | 525                                          | 518                                         | 200                             |
| 5  | Kepulauan Riau     | 302                                           | 865                                       | 525                                          | 518                                         | 200                             |
| 6  | Jambi              | 375                                           | 865                                       | 845                                          | 250                                         | 200                             |
| 7  | Bengkulu           | 375                                           | 865                                       | 845                                          | 250                                         | 200                             |
| 8  | Bangka Belitung    | 375                                           | 865                                       | 845                                          | 250                                         | 200                             |
| 9  | Sumatera Selatan   | 375                                           | 865                                       | 845                                          | 250                                         | 200                             |
| 10 | Lampung            | 375                                           | 865                                       | 845                                          | 250                                         | 200                             |
| 11 | Banten             | 1970                                          | 3873                                      | 2822                                         | 1543                                        | 277                             |
| 12 | Jawa Barat         | 1970                                          | 3873                                      | 2822                                         | 1543                                        | 277                             |
| 13 | DKI Jakarta        | 1970                                          | 3873                                      | 2822                                         | 1543                                        | 277                             |
| 14 | DIY                | 257                                           | 270                                       | 283                                          | 336                                         | 222                             |
| 15 | Jawa Tengah        | 257                                           | 270                                       | 283                                          | 336                                         | 222                             |
| 16 | Jawa Timur         | 257                                           | 270                                       | 283                                          | 336                                         | 222                             |
| 17 | Kalimantan Barat   | 500                                           | 500                                       | 300                                          | 500                                         | 300                             |
| 18 | Kalimantan Selatan | 500                                           | 500                                       | 300                                          | 500                                         | 300                             |
| 19 | Kalimantan Tengah  | 500                                           | 500                                       | 300                                          | 500                                         | 300                             |
| 20 | Kalimantan Timur   | 500                                           | 500                                       | 300                                          | 500                                         | 300                             |

| No | Provinsi            | Air Minum<br>(Rp/m3)             | Industri<br>(Rp/m3)          |                                 |                                | Listrik<br>(Rp/KwH)             |
|----|---------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|    |                     | Air Minum<br>(Rp/m3)<br>Maksimal | Niaga<br>(Rp/m3)<br>Maksimal | Industri<br>(Rp/m3)<br>Maksimal | Tambang<br>(Rp/m3)<br>Maksimal | Listrik<br>(Rp/KwH)<br>Maksimal |
| 21 | Kalimantan utara    | 500                              | 500                          | 300                             | 500                            | 300                             |
| 22 | Sulawesi Utara      | 500                              | 600                          | 700                             | 700                            | 200                             |
| 23 | Sulawesi Tengah     | 1,800                            | 600                          | 628                             | 628                            | 300                             |
| 24 | Gorontalo           | 500                              | 600                          | 700                             | 700                            | 200                             |
| 25 | Sulawesi Selatan    | 500                              | 500                          | 300                             | 500                            | 300                             |
| 26 | Sulawesi Barat      | 500                              | 500                          | 300                             | 500                            | 300                             |
| 27 | Sulawesi Tenggara   | 500                              | 500                          | 300                             | 500                            | 300                             |
| 28 | Nusa Tenggara Barat | 500                              | 500                          | 300                             | 500                            | 300                             |
| 29 | Nusa Tenggara Timur | 500                              | 500                          | 300                             | 500                            | 300                             |
| 30 | Bali                | 257                              | 270                          | 283                             | 336                            | 222                             |
| 31 | Maluku              | 500                              | 600                          | 700                             | 700                            | 200                             |
| 32 | Maluku Utara        | 500                              | 600                          | 700                             | 700                            | 200                             |
| 33 | Papua Barat         | 500                              | 600                          | 700                             | 700                            | 200                             |
| 34 | Papua               | 500                              | 600                          | 700                             | 700                            | 200                             |



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

*Basuki Hadimuljono*

M. BASUKI HADIMULJONO